

LAPORAN KINERJA (LAKIN) T.A. 2018

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG

**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya , Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja (LAKIN) menggambarkan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018. LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang berisikan realisasi target dari penetapan kinerja dan analisis akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan, Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih terukur secara berkesinambungan sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. Berbagai hambatan dan rintangan yang muncul menjadikan tantangan untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan guna mencapai Visi dan Misi.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan laporan ini dari semua pihak sangat kami harapkan, dalam upaya memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran yang lebih akuntabel dimasa mendatang.

Pada akhirnya kami berharap penyajian LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018 ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah khususnya Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 28 Februari 2019
Kepala,

drh. Donni Muksydayan, M.Si
NIP. 19760328200321001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
1.4. Susunan Organisasi	5
1.5. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas	6
1.6. Sumber Daya Manusia	6
1.7. Dukungan Anggaran	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018	11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2018	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan	20
3.4. Outcome	21
3.5. Hambatan dan Kendala	23
3.6. Upaya dan Tindak Lanjut	23
BAB IV. PENUTUP	25
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Total Komposisi SDM Tahun 2018	6
Tabel 2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2018	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018	13
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018	15
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Nilai IKM	17
Tabel 6. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018	20
Tabel 7. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran serta Target dan Realisasi PNBK Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2016-2018	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian melaksanakan program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang ikut mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit hewan dan tumbuhan karantina serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif di pintu-pintu/pelabuhan-pelabuhan pemasukan dan pengeluaran.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan untuk dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk mencapai target tersebut, terdapat banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya perubahan iklim, peningkatan jumlah penduduk, perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi kelembagaan, sumberdaya manusia dan permodalan, dan lain-lain.

LAKIN ini menyajikan gambaran capaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018 dalam bidang pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Keberhasilan ini dapat dicapai berkat kerja keras dari seluruh pegawai dan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang memiliki komitmen dalam melaksanakan Renstra Tahun 2015-2019, yang diwujudkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang dilaksanakan antara Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian. Secara umum hasil pengukuran terhadap

sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja memperlihatkan bahwa sasaran kinerja telah berhasil dicapai.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** dicapai yaitu : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang (sesuai dengan target yaitu 3,38 skala Likert 1-4), Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang berhasil melampaui target dengan nilai 3,49. (2) Tingkat kepuasan unit Eselon III terhadap layanan internal Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang (belum sesuai dengan target yaitu 3,63 skala Likert 1-4) Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang memperoleh nilai sebesar 3,43. (3) jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang yang diselesaikan (belum sesuai dengan target yaitu 1, untuk tahun 2018 tidak ada kasus),(4) Jumlah Komoditas Ekspor Pertanian di Lingkup BKP Kelas III yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan (0), (5) Jumlah komoditas import pertanian di lingkup BKP Kelas III yang memenuhi persyaratan Impor Indonesia (dengan target 2, sementara Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang mencapai 546). (6) Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas III (dengan target 1, sementara Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang tidak ada temuan OPTK) (7) Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas III (dengan target 2, sementara Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang tidak ada temuan HPHK). (8) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang yang terjadi berulang (nihil). (9) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang (nihil).

Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Kelas III Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp. 9.736.077.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.703.251.876 (99,66%). Sedangkan realisasi PNPB tahun 2018 sebesar 2.267.518.164 (133,28%) dari target sebesar 1.700.000.000.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dasar hukum akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu :

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 /dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, pada Bab Penjelasan, dijelaskan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang merupakan prinsip dasar dari *good governance and clean government*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada bab penjelasan, dijelaskan azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 55 ayat 5, dijelaskan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah
4. PP Nomor 8 Tahun 2006, pasal 20, dijelaskan kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah
5. Perpres Nomor 29 Tahun 2014, pasal 29, dijelaskan pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 76 dan 77, dijelaskan dasar perjanjian kinerja, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang merupakan petunjuk teknis kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu laporan kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan dasar hukum akuntabilitas kinerja tersebut diatas, telah disusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan sakip di Kementerian Pertanian yang menjadi pedoman pengelolaan sakip semua unit instansi di lingkup Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan pembangunan perkarantina dilakukan sebagai upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Oleh karena itu, peran karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebar nya HPHK/OPTK, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal.

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis pelayanan publik di bidang karantina hewan dan tumbuhan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Tugas yang diemban UPT Karantina Pertanian adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Kedudukan

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Visi dan Misi

a. Visi

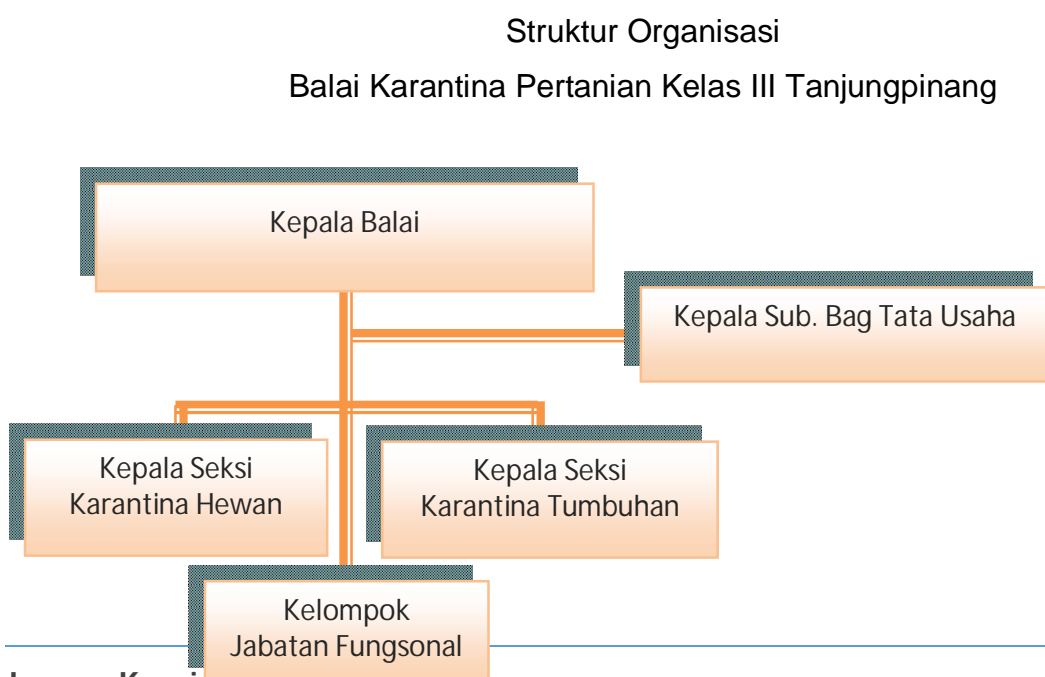
Menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya.

b. Misi

- 1) Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 2) Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 3) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 4) Memperkuat kemitraan perkarantinaan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 5) Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan jabatan eselon III.b dan dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi dengan jabatan eselon IV.b. Struktur organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/permentan/OT.140/4/2008 adalah sebagaimana Gambar berikut :



E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
- PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

F. Dukungan Anggaran

Guna meningkatkan kinerja Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang diperlukan anggaran untuk mendukung terealisasinya kinerja Tahun 2018. Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang pada awal Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.736.077.000 dan untuk total realisasi pelaksanaan anggaran untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 9.703.251.876, (99,66%).

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran dan Indikator Kinerja

Arah Kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dalam mengemban tugas dan fungsinya yaitu mendukung kebijakan Badan Karantina Pertanian-Kementerian Pertanian dalam rangka pencapaian program prioritas nasional terutama dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan.

Salah satu fungsi utama Badan Karantina Pertanian yang ditopang oleh semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar efektif, efisien dan akuntabel.

c. Visi

Menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan

Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya.

d. Misi

- 6) Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 7) Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 8) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 9) Memperkuat kemitraan perkarantinaaan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
- 10) Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

e. Tujuan

- 1) Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK;
- 2) Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan;
- 3) Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk keluarnya media HPHK dan OPTK
- 4) Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaaan;
- 5) Mewujudkan pelayanan prima.

f. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran program Badan Karantina Pertanian. Kondisi yang

diinginkan yaitu mendorong tercapainya tugas pokok dan fungsi karantina Pertanian yang ideal di masa yang akan datang, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis dan era perdagangan bebas.

Sasaran yang ditetapkan Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang adalah mendukung meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian.

g. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang adalah :

- 1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas III
- 2) Tingkat Kepuasan unit eselon III terhadap layanan internal BKP Kelas III
- 3) Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang diselesaikan
- 4) Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan
- 5) Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang memenuhi persyaratan impor Indonesia
- 6) Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III
- 7) Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas III
- 8) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas III yang terjadi berulang
- 9) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dalam melaksanakan Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2015-2019 diwujudkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang dilaksanakan antara Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (PK) tahun 2018 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan merupakan dokumen perjanjian kinerja selama satu tahun antara Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian. PK dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang sebagai pihak pertama dan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai pihak kedua telah menandatangani perjanjian penetapan kinerja tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam lampiran perjanjian. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dengan adanya penetapan PK tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan instansi dapat lebih terarah dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas layanan Publik Badan Karantina Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BKP Kelas III	3.38 Skala Likert (1-4)
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon III Terhadap Layanan Internal	3.63 Skala Likert (1-4)
	Jumlah Kasus Komoditas Pertanian di Lingkup BKP Kelas III yang di selesaikan	1,00
	Jumlah Komoditas Ekspor Pertanian di Lingkup BKP Kelas III yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan`	0,00
	Jumlah komoditas import pertanian dilingkup BKP Kelas III yang memenuhi persyaratan Impor Indonesia	2,00
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas III	1,00
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas III	2,00
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas III yang terjadi berulang	0,00
	Jumlah temuan ITJEN atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	0,00

Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan pengawasan keamanan hayati : Rp.9.736.077.000,-

C. Program, kegiatan, dan OUTPUT

Sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian, Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang yang menunjang Program Badan Karantina Pertanian, yaitu Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Sasaran kegiatan ini mendukung meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian.

Penjabaran Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 yang terinci dalam 1 tahun sehingga dapat menjelaskan peran dan kontribusinya dalam pencapaian output sebagai tercantum dalam Lampiran 3.

D. Analisis Lingkungan dan Strategis

Sumber Daya (SDM, Sarana/ Prasarana)

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang di dukung oleh sumber daya manusia berjumlah 55 orang PNS yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 7 orang Pegawai Medik Veteriner, 13 orang Pegawai Paramedik Veteriner, 7 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 13 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil, 1 orang Pegawai Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 1

calon orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil dan 9 orang Pegawai Fungsional Umum.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang mempunyai Gedung Kantor Induk yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang seluas 409 M², Gedung Laboratorium Karantina Hewan seluas 100 M², yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang, Laboratorium Karantina Tumbuhan seluas 50 M², Screen House seluas 52 M², Bangunan Incenerator 4 M², Gedung Layanan Pengaduan dan Informasi Teknis seluas 146 M², Gedung Wilker Sri Payung Batu Enam seluas 80 M² yang terletak di Jl. RT. Martadinata Tanjungpinang, Gedung Kanor Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah seluas 200 M² yang terletak di Jalan Baru Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Gedung Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayintan Kijang seluas 117 M² yang terletak di Jl. Sri Bayintan Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan, Gedung Kantor Wilker Tanjung Uban Seluas 140 M² yang terletak di Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.

Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang mempunyai Kantor Wilayah Kerja sebagai berikut:

1. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura.
 2. Wilker Pelabuhan Laut Pelantar II.
 3. Wilker Pelabuhan Laut Sri Payung Batu Enam.
 4. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayintan Kijang.
 5. Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah.
 6. Wilker Pelabuhan Laut Tanjung Uban.
 7. Wilker Pelabuhan Laut Pulau Bulan.
 8. Wilker Pelabuhan Laut Lagoi.
 9. Wilker Kantor Pos Tanjungpinang.

I. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja UPT Balai Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang dianalisa dengan :

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja TA 2018;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah;
- d. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar di Badan Karantina Pertanian;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan setiap capaian sasaran dan indikator ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| a. Sangat Berhasil | : >100% |
| b. Berhasil | : 80 – 100% |
| c. Cukup Berhasil | : 60 – (< 80%) |
| d. Kurang Berhasil | : <60% |

Apabila ada capaian yang sangat melampaui target atau lebih dari 200% dari target, dinyatakan dalam data anomali yaitu 200%*).

Angka ini merupakan salah satu kriteria yang disepakati dalam PMK 249/2011 Jo. 214/2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan perhitungan capaian indikator kinerja. Data perhitungan capaian indikator kinerja tersebut bersumber dari aplikasi basis data kegiatan operasional karantina pertanian yang tersedia pada aplikasi IQ-FAST maupun laporan Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, dan Wasdak (Sub Seksi Pelayanan Operasional) serta Tata Usaha BKP Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018.

Data dimaksud sebagaimana Tabel 4 yang memuat sebagai berikut :

- a. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil rekap data dan laporan survey kuesioner atas layanan publik BKP Kelas III Tanjungpinang yang dilakukan tiap semester;
- b. Nilai Tingkat Kepuasan Unit Eselon III terhadap layanan internal BKP Kelas III berdasarkan rekap data dari Tata Usaha
- c. Data penyelesaian kasus sampai P21 berdasarkan rekap data dan laporan dari Sub Seksi Pelayanan Operasional;
- d. Data penolakan komoditas ekspor oleh negara tujuan berdasarkan rekap data dari Sub Seksi Pelayanan Operasional;
- e. Data komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang memenuhi persyaratan impor Indonesia berdasarkan rekap data dari Sub Seksi Pelayanan Operasional
- f. Data temuan OPTK dan HPHK berdasarkan rekap data dan laporan dari Sub Seksi Pelayanan Operasional;
- g. Data temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas III Tanjungpinang yang terjadi berulang berdasarkan hasil audit dan tindak lanjut dari Tata Usaha;
- h. Data temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan BKP Kelas III Tanjungpinang yang terjadi berulang berdasarkan hasil audit dan tindak lanjut dari Tata Usaha;

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) tahun 2015–2018 secara lengkap sebagaimana tabel 4.

Tabel 4.
Perkembangan Capaian Dan Target IKSK 2015 -2018

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	% Realisasi thd Target 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
IKSK.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas III Tanjungpinang	Target IKSK.1	-	-	3.16	3.38	-	-
	Realisasi IKSK.1	3.42	3.47	3.48	3.49	98,49%	103,46%
IKSK.2: Tingkat Kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal BKP Kelas III Tanjungpinang	Target IKSK.2	-	-	-	3,63	-	-
	Realisasi IKSK.2	-	-	-	3,43	100%	94,49%
IKSK.3: Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang diselesaikan	Target IKSK.3	-	-	-	1,00	-	-
	Realisasi IKSK.3	-	-	-	0,00	0%	0%
IKSK.4: Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan	Target IKSK.4	-	-	-	2,00	-	-
	Realisasi IKSK.4	-	-	-	0,00	100%	100%
IKSK.5: Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang memenuhi persyaratan impor Indonesia	Target IKSK.5	-	-	-	546	100%	273%
	Realisasi IKSK.5	-	-	-			
IKSK.6: Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III Tanjungpinang	Target IKSK.6	-	-	-	2	-	-
	Realisasi IKSK.6	-	-	-	0	100%	100%
IKSK.7: Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas III Tanjungpinang	Target IKSK.7	-	-	-	1	-	-
	Realisasi IKSK.7	-	-	-	0	100%	100%

IKSK.8: Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas III yang terjadi berulang	Target IKSK.8	-	-	-	1	-	-
	Realisasi IKSK.8	-	-	-	0	0%	0%
IKSK.9: Jumlah temuan ltjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	Target IKSK.9	-	-	-	0	-	-
	Realisasi IKSK.9	-	-	-	0	100%	100%

Tabel 5
Data Terkait Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Balai
Karantina Pertanian Kelas III Tanjungpinang Tahun
2018

No	Parameter	Jumlah
1	Nilai IKM Tahun 2018	3.49 (87,94)
2	Jumlah kasus karantina sampai P21	0
3	Jumlah kasus yang ditangani PPNS (P1/P2)	0
4	Jumlah temuan audit BPK	0
5	Jumlah temuan audit Itjen	0
6	Jumlah temuan HPHK Gol I pada ops	0
7	Jumlah temuan HPHK Gol II pada ops	0
8	Jumlah temuan OPTK Gol I pada ops	12
9	Jumlah temuan OPTK Gol II pada ops	5
10	Penolakan ekspor KH	0
11	Penolakan ekspor KT (NNC)	0
12	Pembebasan impor KH : yang memenuhi syarat	292
13	Pembebasan impor KT : yang memenuhi syarat	253
14	Sertifikasi ekspor KH (HC)	309
15	Sertifikasi ekspor KT (PC)	242
16	Pembebasan domestik masuk KH	4.879
17	Pembebasan domestik masuk KT	4.011
18	Sertifikasi domestik keluar KH	3.605
19	Sertifikasi domestik keluar KT	696
20	Nilai Kinerja Keuangan (PMK 249/2011 jo 214/2107)	78,01

Keterangan :

- a. Sumber : IQ-FAST, Laporan Keuangan, Laporan Operasional.
- b. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perkarantinaan merupakan kasus pro-justisi yang ditangani oleh PPNS BKP Kelas III Tanjungpinang dan mencapai P-21

Analisis capaian kinerja terhadap capaian indikator kinerja kegiatan BKP Kelas III Tanjungpinang Tahun 2018 adalah sebagai Tabel 6.

Tabel 6
Indikator Kinerja BKP Kelas II Tanjungpinang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas III Tanjungpinang (IKSK-1)	3.38 Skala Likert (1-4) atau 83	3.49 (atau 87,42)	103.46 %
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal BKP Kelas III Tanjungpinang (IKSK-2)	3,63 Skala Likert (1-4) atau 75	3,43	94,49 %
	Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaaan BKP Kelas III yang diselesaikan (IKSK-3)	1	0	-100%
	Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaaan BKP Kelas III yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan (IKSK-4)	1	0	100%
	Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaaan BKP Kelas III yang memenuhi persyaratan impor Indonesia (IKSK-5)	2	546	273%
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaaan BKP Kelas III (IKSK-6)	0	0	100%
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaaan BKP Kelas II (IKSK-7)	0	0	100%
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas II yang terjadi berulang (IKSK-8)	1	0	100%
	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang (IKSK-9)	1	0	100%

Tabel 6

Keterangan:*) data anomali

Sedangkan, sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 7 di bawah ini.

Tahun 2018

Kegiatan Operasional	Impor	Domestik Masuk	Domestik Keluar	Ekspor	Jumlah Sertifikasi	NNC
Karantina Hewan						
Pemeriksaan	292	4.879	3.605	309	9.085	
Pembebasan	292	4.879	3.605	309	9.085	0
Karantina Tumbuhan						
Pemeriksaan	253	242	3.317	242	4.054	
Pembebasan	253	242	3.317	242	4.054	0
Jumlah	545	5121	6.922	551	13.139	

Secara umum, penggunaan sertifikat ini menggambarkan frekwensi media pembawa yang dilalulintaskan kedalam wilayah negara RI (impor), keluar wilayah RI (Ekspor) maupun yang di dalam wilayah RI (antar Area). Kegiatan operasional di BKP Kelas III Tanjungpinang meliputi kegiatan Ekspor, Impor dan antar area.

3.2. Perhitungan dan Analisis Capaian Kinerja

321. IKSK 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas II Tanjungpinang

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat. Masih terdapat berbagai kelemahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Badan Publik perlu menyusun Indeks

Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit survei IKM terhadap unit pelayanan Informasi publik.

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi publik merupakan sesuatu yang penting yang harus diberikan oleh petugas pelayanan informasi. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, BKP Kelas II Tanjungpinang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan dua kali setahun, semester I dan semester II.

IKM merupakan salah satu tolok ukur penilaian masyarakat terhadap kepuasan layanan perkarantina. Penilaian IKM dilakukan berdasarkan survey kepada pengguna jasa karantina pada BKP Kelas II Tanjungpinang. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 (empat belas) unsur pada semester I dan 9 (sembilan) unsur pada semester II unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

II. Semester I

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$$

III. Semester II

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ UKPP} \times 25$$

Tabel 8. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja UKPP Semester I dan II

Semester I

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D (Tidak Baik)
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C (Kurang Baik)
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B (Baik)
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100,00	A (Sangat Baik)

Semester II

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B (Baik)
4	3,533– 4,00	88,31 - 100,00	A (Sangat Baik)

Hasil Survey Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan selama periode semester I (Januari s. d Juni 2018) mendapat nilai interval **87,330 (3.49)** masuk Kategori **Sangat Baik**, sedangkan hasil survey pada periode Semester Ke II (Juli s.d Desember 2018) **87,42 (3.49)** masuk kategori **Baik** sehingga total rerata nilai IKM Tahun 2018 adalah sebesar **87,37 (3,49)**

Dibandingkan dengan target TA 2017 nilai IKM senilai **87,11 (3.48)** terdapat kenaikan sebesar 0.26 poin dari hasil survey yang telah dilaksanakan pada periode TA 2018

Tabel 9
Perkembangan Capaian IKSK.1

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target	-	-	3.16	3.32	3.00	-	-	-
Realisasi	3.31	3.39	3,48	3.49	-	105,12%	100,28%	102,28%

- a. Perbandingan target dan realisasi Tahun ini
Realisasi kinerja IKM Tahun 2018 sebesar 3.49 dengan nilai

87.37 atau lebih tinggi 0.17 poin dari target yang ditetapkan Tahun 2018 sebesar 3.32 (skala likert) dengan nilai 83 dari target yang ditetapkan Tahun 2018 sebesar 83 yang juga merupakan target capaian Badan Karantina Pertanian.

- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya
Realisasi kinerja IKM Tahun 2018 sebesar 3.49, realisasi tersebut lebih tinggi 0.01 poin dibanding realisasi Tahun 2017 sebesar 3,48.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2018 dengan target jangka menengah
Dilihat dari capaian kinerja IKM selama 4 Tahun terakhir Tahun 2015 (3.42), 2016 (3.47) dan 2017 (3.48), 2018 (3.49) lebih tinggi dari target per Tahun, dan diperkirakan dapat mencapai target 2019 sebesar 3.00.
- d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Tabel 10
Target Nilai IKM Badan Karantina Pertanian Tahun 2018

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Nilai IKM	80	81	82	83	84

Sumber : Renstra Badan Karantina Pertanian 2015-2019 edisi revisi

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional di lingkup Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa nilai IKM BKP Kelas II sebesar (3.49) atau dengan nilai 87,37 sudah dapat mencapai target Nilai IKM Kementerian Pertanian sebesar 83 di Tahun 2018, sebagaimana Tabel 10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan pada BKP Kelas II Tanjungpinang harus terus menerus dipertahankan dan dilakukan perbaikan sehingga target tersebut dapat terlaksana

dengan baik, serta telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain :

- 1) Upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa karantina mulai dari permohonan pemeriksaan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya sampai dengan pembebasan MP HPHK/OPTK dengan terus memperbaiki sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan publik di seluruh titik dan wilayah kerja BKP Kelas II Tanjungpinang
- 2) Peningkatan Sistem, Mekanisme dan Prosedur khususnya kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Lebih mudah didapatkan melalui media online/website.
- 3) Waktu penyelesaian yang diberikan kepada para pengguna jasa/stakeholder harus terus ditingkatkan, dan diupayakan untuk melakukan penerapan SNI ISO 9001:2008 untuk standar pelayanan, dan ISO 37001:2016 standar manajemen anti penyuapan selain SNI ISO IEC 17025:2008 yang sudah terakreditasi laboratorium.
- 4) Upaya Meningkatkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik tahun mendatang dapat dilakukan.
- 5) Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik lingkup BKP Kelas II Tanjungpinang.
- 6) Menjaga konsistensi penerapan manajemen anti penyuapan.
- 7) Optimalisasi pemanfaatan IQ-Fast dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tupoksi karantina.
- 8) Peningkatan pemahaman masyarakat melalui Sosialisasi,

9) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan karantina.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK-1 menunjukkan efisiensi sebesar 2,95% dengan nilai efisiensi 57,38% sebagaimana perhitungan pada Tabel 11.

Tabel 11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.1

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) - RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Layanan Publik BKP Kelas II Tanjungpinang (IKSK-1)	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1.175.012.256	1.174.541.638	0.04 %	60.01%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

-
- g.** Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - 1) Pemanfaatan teknologi dalam rangka percepatan pelayanan melalui inovasi pembayaran layanan non tunai (EDC).
 - 2) Keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik termasuk tarif, prosedur, dan waktu layanan

3.2.2. IKSK 2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal BKP Kelas II Tanjungpinang

Indikator Tingkat kepuasan unit eselon IV terhadap layanan internal diukur menggunakan quesioner pengukuran Pengguna Layanan Internal terhadap layanan Subbag Tata Usaha di BKP Kelas II Tanjungpinang. Hasil pengukuran dilakukan dalam bentuk pengisian quesioner yang bersifat tertutup dan menggunakan metode kuantitatif yang disebarkan kepada responden. Responden dilakukan kepada seluruh pegawai BKP Kelas II Tanjungpinang

Tabel 12. Capaian indikator IKSK 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan unit eselon IV terhadap layanan internal	3,00	3,00	100,00 %

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 3,00 sama dengan target tahun 2018 sebesar 3,00, sebagaimana Tabel 12 diatas.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 100%, realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 Badan Karantina Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan Renstra BKP Kelas II Tanjungpinang, sehingga terjadi perubahan indikator kinerja Tahun 2018 – 2019 sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Perkembangan capaian IKSK 2

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.1	-	-	-	3,00 (75,00)	3,00 (75,00)	-	-	-
Realisasi IK. 1	-	-	-	3,00 (75,00)	-	100,00%	-	100,00%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100% telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 100%. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Badan Karantina Pertanian karena pada IKU Badan Karantina Pertanian Tidak ada IKU tersebut.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan :

- 1) Pelayanan terhadap layanan internal di BKP Kelas II Tanjungpinang berjalan dengan baik
- 2) Terfasilitasinya semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional perkarantinaan
- 3) Pelayanan administrasi pegawai berjalan dengan baik
- 4) Kemudahan dalam berkoordinasi dan bekerjasama
- 5) Kecakapan personil dalam memahami keluhan dan *feedback* pengguna layanan internal

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan :

- 1) Pengembangan inovasi pelayanan internal pada pegawai BKP Kelas II Tanjungpinang, misal : Aplikasi TPI Play
- 2) Meningkatkan kompetensi petugas administrasi
- 3) Meningkatkan kemampuan petugas dalam penyampaian informasi terhadap pengguna layanan internal

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK - 2 menunjukkan efisiensi sebesar 1,01% dengan nilai efisiensi 52,52% sebagaimana perhitungan pada Tabel 14.

Tabel 14.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.2

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) - RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Tingkat Kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal BKP Kelas II (IKSK-2)	Layanan Internal Overhead	854.512.800	853.405.800	0,129 %	50,32%
	Layanan Perkantoran	7.712.252.168	7.677.284.562		

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

-
- g.** Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- 1) Penguatan komitmen dan implementasi pelayanan oleh seluruh jajaran tata usaha kepada pengguna layanan internal.
 - 2) Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung pelayanan internal.
 - 3) Keterbukaan informasi terhadap pengguna layanan internal, berkaitan dengan pengurusan ketatausahaan

3.23. IKSK 3. Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang diselesaikan

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2018 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang ditangani oleh PPNS BKP Kelas II Tanjungpinang, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$ik3 \cdot \frac{\text{jumlahkasusKHdanKTyangdiselesaikantahapp21}}{\text{jumlahkasuspelanggaranKHdanKTyangterjadi}} \times 100\%$$

Tabel 15. Capaian indikator IKSK 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang diselesaikan	1	0	0.00 %

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini

Realisasi penyelesaian kasus tahun 2018 sebesar 0%, hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 tidak terdapat kasus pelanggaran di BKP Kelas II Tanjungpinang, sebagaimana Tabel 15

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0%, realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 Badan Karantina Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan Renstra BKP Kelas II Tanjungpinang, sehingga terjadi perubahan indikator kinerja Tahun 2018 – 2019 sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Perkembangan capaian IKSK 3

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.3	-	-	-	1	1	-	-	-
Realisasi IK.3	-	-	-	0	-	0 %	-	0 %

-
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah.

Capaian kinerja tahun 2018 sebesar nol yang menyatakan lebih rendah dari target yaitu 1. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya kasus di BKP Kelas II Tanjungpinang sehingga tidak diperlukan penyelesaian kasus.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 0% tidak mencapai standar Barantan yaitu sebesar 40%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan karantina Pertanian dan telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Pertanian. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya kasus di BKP Kelas II Tanjungpinang sehingga tidak diperlukan penyelesaian kasus

- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan :

- 1) Peningkatan kompetensi SDM karantina pertanian dalam bidang kewasdakan
- 2) Dukungan operasional melalui kerjasama dengan TNI AD, TNI AL dan POLRI dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan.
- 3) Penguatan kerja sama perkarantinaan antar UPT
- 4) Optimalisasi petugas karantina yang menjabat sebagai POLSUS, PPNS dan Intelijen dalam penguatan pengawasan dan penindakan.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan :

- 1) Penguatan sinergitas petugas karantina dalam melaksanakan fungsi PPNS, Intelijen dan pelaksanaan

teknis perkarantinaan.

- 2) Peningkatan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus melalui pendidikan dan pelatihan kewasdakan
- 3) Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya yang mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan.
- 4) Penguatan kerja sama antar UPT
- 5) Penguatan pengawasan berbasis data melalui IQ FAST
- 6) Penderasan informasi perkarantinaan melalui media informasi.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK - 3 menunjukkan efisiensi sebesar 0% dengan nilai efisiensi 0% sebagaimana perhitungan pada Tabel 17.

Tabel 17.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.3

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) - RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantina an BKP Kelas II yang diselesaikan (IKSK-3)	Layanan sertikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati Impor	1.174.541.638	1.174.541.638	0 %	0%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

- g.** Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- 1) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKP Kelas II Tanjungpinang dan kegiatan kewasdakan di UPT
 - 2) Penguatan Komitmen dalam implementasi kegiatan kewasdakan oleh petugas POLSUS, PPNS dan INTELIJEN pada BKP Kelas II Tanjungpinang
 - 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelesaian kasus
 - 4) Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung kegiatan Kewasdakan

3.24. IKSK 4. Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, BKP Kelas II Tanjungpinang melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi dibanding jumlah komoditas pertanian ekspor yang tidak memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, dengan indikasi jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor dalam bentuk *Notification of Non Compliance (NNC)*, Brafak, atau dokumen lainnya. Target dari indikator kinerja 1 artinya maksimal sertifikasi produk pertanian ekspor yang tidak memenuhi persyaratan negara tujuan sebesar 1. Penghitungan indikator sebagai berikut :

$$IKK 4 = \frac{JNNC}{x100\% JE}$$

Keterangan:

JNNC = Jumlah pemberitahuan Ketidaksesuaian Karantina Hewan dan Tumbuhan

JE = Jumlah sertifikasi ekspor Karantina Hewan dan Tumbuhan

Lalu lintas ekspor media pembawa dan pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor selama tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 18.

Tabel 18. Lalulintas ekspor media pembawa dan jumlah pemberitahuan ketidak sesuaian atas ekspor media pembawa tahun 2018

Kegiatan Operasional	Frek. Pemeriksaan (kali)	Frek. Pembebasan*) (kali)	JNNC
Karantina Hewan	309	309	0
Karantina Tumbuhan	242	242	0
Total	551	551	0

*) Frekuensi Pembebasan = jumlah sertifikasi ekspor (JE)

$$IKU 4 = \frac{0}{6.829} \times 100\% = 0,00\%$$

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0. Dari 6.829 sertifikat yang diterbitkan tidak melebihi target nilai maksimal yang ditetapkan tahun 2018 yaitu 1 NNC. Dengan tidak adanya NNC (penolakan

dari negara tujuan) yang didapatkan, maka mencerminkan bahwa sertifikasi komoditas ekspor pertanian yang telah dilakukan oleh BKP Kelas II Tanjungpinang telah maksimal dalam menjamin kesehatan dan keamanan komoditas ekspor pertanian.

Tabel 19. Perkembangan capaian IK. 4

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.4	-	-	-	1	1	-	-	-
Realisasi IK.4	-	-	-	0		0 %	-	0 %

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 NNC. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 Badan Karantina Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan Renstra BKP Kelas II Tanjungpinang, sehingga terjadi perubahan indikator kinerja Tahun 2018 – 2019 sebagaimana Tabel 19.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 NNC, realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yaitu tidak melebihi target maksimal jangka menengah tahun 2019, yaitu sebesar 1 NNC.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 0 yang tidak melebihi dari standar yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian.

- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Keberhasilan Tidak adanya NNC yaitu :
- 1) Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas pertanian.
 - 2) Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan terlampir.
 - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Badan Karantina dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan (Perlakuan,) melalui pelatihan, dan bimbingan teknis (diseminasi).
 - 4) Pengembangan teknik dan metode perlakuan terhadap MP yang akan di ekspor

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan :

- 1) Akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional,
- 2) Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait yang mendukung akselerasi ekspor,
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem audit
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran.

6) Penyampaian informasi teknis komoditas ekspor yang diperlukan Negara tujuan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK 4 menunjukkan efisiensi sebesar 0% dengan nilai efisiensi 0% sebagaimana perhitungan pada Tabel 20.

Tabel 20
Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKSK.4

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Ekspor	0	0	0 %	0%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan :

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dilapangan dan pemahaman pengiriman lalu lintas media pembawa ekspor cukup baik sehingga tidak terjadi penolakan dari negara tujuan.
- 2) Indikator ke-4 mencapai target karena sertifikasi kesehatan ekspor dilakukan oleh petugas karantina yang kompeten, pemenuhan persyaratan negara tujuan terlaksana dengan baik
- 3) Sistem, prosedur dan persyaratan ekspor oleh negara tujuan masyarakat dan pengguna jasa sudah memenuhi standar

325. IKSK 5. Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang memenuhi persyaratan impor Indonesia

Jaminan kesehatan merupakan outcome atas proses tindakan karantina dengan diterbitkannya sertifikat pembebasan terhadap media pembawa yang masuk atau diimpor, untuk memastikan bebas HPHK atau OPTK. Target tahun 2017 secara nasional adalah 96%.

Lalulintas media pembawa Impor selama tahun 2018 sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Lalulintas media pembawa Impor tahun 2018

Kegiatan Operasional	Frek. Pemeriksaan (kali)	Frek. Pembebasan (kali)
Karantina Hewan	292	292
Karantina Tumbuhan	253	253
Total	545	545

Perhitungan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$IKSK\ 5 = \frac{(603)}{300} \times 100\% = 201,00\%$$

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini
 Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 545 sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa sertifikat yang ter realisasi lebih besar dari target tahun 2018 sebesar 300 sertifikat.

Tabel 22. Perkembangan capaian IKSK.5

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi thn 2018 thdp 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.5	-	-	-	300	300	-	-	-
Realisasi IK.5	-	-	-	545	-	181,6%	0%	181,6%

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya
 Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 545 sertifikat (181,6%) tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 lingkup kementerian Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja Tahun 2018-2019

-
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah.
Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 545 sertifikat telah memenuhi target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 sebesar 300 sertifikat
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan standar Badan Karantina Pertanian
Realisasi kinerja tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang 181,6% telah mencapai standar nasional Badan Karantina Pertanian yaitu sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Pertanian dan telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Pertanian.
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan :
- 1) Kepatuhan dan kemampuan negara asal dalam memenuhi persyaratan pemasukan MP sesuai peraturan dan pedoman yang ditetapkan semakin meningkat.
 - 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BKP Kelas II Tanjungpinang dalam menjalankan tindakan karantina 8P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan.
 - 3) Penguatan pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi teknis hasil analisis risiko OPTK dan manajemen risiko HPHK.
 - 4) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional..

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan :

- 1) Melakukan mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain status dan situasi HPHK – OPTK, serta peningkatan lalulintas media pembawa..
- 2) Penguatan kemampuan dan penambahan ruang lingkup pengujian, analisis risiko terhadap HPHK/ OPTK antara lain:
 - a) mengupayakan akses informasi dan basis data yang akurat dan terkini,
 - b) membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi lain.
 - c) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
- 3) Penguatan sarana dan prasarana tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan yang berisiko tinggi.
- 4) Peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK. 5 menunjukkan efisiensi sebesar 75,80% dengan nilai efisiensi 239,51% sebagaimana perhitungan pada Tabel 23.

Tabel 23. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IKSK. 5

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II yang memenuhi persyaratan impor Indonesia	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	199.629.421,20	151.328.521,20	75,80%	239,51%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dilapangan dan pemahaman pengiriman lalu lintas media pembawa impor cukup baik sehingga tidak semua persyaratan dapat dipenuhi dan dilakukan tindakan karantina sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia
- 2) Indikator ke-5 melampaui target karena sertifikasi kesehatan terhadap pemasukan media pembawa ke wilayah Indonesia dilakukan oleh petugas karantina yang kompeten, implementasi peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia terlaksana dengan baik

326. IKSK 6. Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II

Temuan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi BKP Kelas II Tanjungpinang dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK ke dalam wilayah Indonesia. Perhitungan capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$IKSK\ 6\ \frac{Jenis\ Temuan\ HPHK\ Gol\ I}{jumlah\ Pemeriksaan\ impor} + \frac{Jenis\ Temuan\ HPHK\ Gol\ II}{jumlah\ pemeriksaan\ DM+DK} \times 100\%$$

Keterangan : Penghitungan terhadap temuan HPHK pada kegiatan operasional karantina hewan Impor, Domestik Masuk (DM), Domestik Keluar (DK)

—

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 24 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

$$IKSK 6 \frac{0}{26} + \frac{0}{3.582+2.808} \times 100\% = 0,00\%$$

Tabel 24
Perkembangan Capaian IKSK.6

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK 6	-	-	-	0	0	-	-	-
Realisasi IKSK 6	-	-	-	0	-	0	0	0

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018 sebesar 0 HPHK, atau sama dengan target Tahun 2018 sebesar 0 HPHK, sebagaimana Tabel 24.

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 0 HPHK, realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 lingkup kementerian Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja Tahun 2018-2019 sebagaimana Tabel 24.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2018 dengan target jangka menengah.

Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 0 HPHK, telah mencapai target jangka menengah sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0 HPHK

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 0 HPHK di bawah standar nasional Barantan yaitu 0.00019%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Pertanian.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan deteksi HPHK terkait pemasukan dan pengeluaran media pembawa yang dilalu lintaskan pada kegiatan impor, ekspor maupun antar area melalui pintu pemasukan dan pengeluaran di wilker BKP Kelas II Tanjungpinang;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BKP Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan tindakan karantina 8P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Kegiatan penunjang sarana prasarana teknis/ laboratorium.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan :

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan berdasar analisis risiko.
- 2) Penguatan sarana dan prasarana tindakan karantina di tempat tempat pemasukan yang berisiko tinggi
- 3) Peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina di BKP Kelas II Tanjungpinang.

f. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0% dengan nilai efisiensi 0% sebagaimana perhitungan pada Tabel 25 dibawah ini

Tabel 25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.6

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	0	0	0 %	0%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

g. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja dapat mencapai target karena regulasi dan sertifikasi kesehatan terhadap pemasukan media pembawa ke wilayah Indonesia dilakukan oleh petugas karantina yang berkompeten, implementasi peraturan perkarantinaan terhadap media pembawa ke dalam wilayah Indonesia terlaksana dengan baik.

3.27. IKSK 7. Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BKP Kelas II

Temuan OPTK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Perhitungan capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$IKSK_{A2} 7 = \frac{\text{Jenis Temuan OPTK A1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan Impor}} + \frac{\text{Jenis Temuan OPTK}}{\text{Jumlah pemeriksaan DM+DK}} \times 100\%$$

Keterangan : Penghitungan terhadap temuan OPTK pada kegiatan operasional karantina tumbuhan Impor, Domestik Masuk (DM), Domestik Keluar (DK)

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 26 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

$$IKSK\ 7 = \frac{12}{577} + \frac{5}{463+21421} \times 100\% = 2,10\%$$

Tabel 26
Perkembangan Capaian IKSK.7

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK 7	-	-	-	10	10	-	-	-
Realisasi	-	-	-	0		100	-	100

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 temuan OPTK (100%) masih dibawah target tahun 2018 sebesar 10 temuan OPTK, sebagaimana tabel 26.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100%, realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 lingkup Kementerian Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan Renstra Badan Karantina Pertanian.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2018 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 100% telah mencapai target jangka menengah sampai dengan Tahun 2019

sebesar 50% yang merupakan target indikator kinerja Badan Karantina Pertanian

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 50% telah mencapai dan melebihi standar nasional Kementerian pertanian yaitu 0.006%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan deteksi OPTK yang dilalulintaskan baik impor dan domestik antar area
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BKP Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan tindakan karantina 8P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Kegiatan penunjang sarana dan prasarana teknis dan laboratorium

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan :

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan berdasarkan analisis risiko.
- 2) Penguatan sarana dan prasarana tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan yang berisiko tinggi
- 3) Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina di wilayah BKP Kelas II Tanjungpinang

f. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK 7 menunjukkan efisiensi sebesar 42,66% dengan nilai efisiensi 156,65% sebagaimana perhitungan pada Tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.7

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	12.353.000	35.947.900	42,66%	156,65%
	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area	73.630.500	72.628.625		

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

Tabel 29

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian target kinerja karena regulasi yang selalu diupdate dan sertifikasi kesehatan terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa di Wilayah Kerja BKP Kelas II Tanjungpinang, implementasi peraturan perkarantinaaan dan keamanan hayati dalam rangka penyelenggaraan karantina setiap tahun mengalami peningkatan baik arus lalu lintas ekspor, impor dan domestik.

3.2.8. IKSK 8. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas II yang terjadi berulang

Pada tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Tahun 2018 tidak

terdapat temuan tindak lanjut BPK yang berulang. Hal ini mencerminkan bahwa BKP Kelas II Tanjungpinang telah berupaya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak adanya temuan atas pemeriksaan BPK. Realisasi pencapaian indikator kinerja sebagai tabel 28.

Tabel 28
Perkembangan Capaian IKSK. 8

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK 8	-	-	-	1	1	-	-	
Realisasi	-	-	-	0		0	0	0*)

Tabel 29

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Realisasi jumlah temuan BPK yang berulang atas pengelolaan keuangan sebesar 0%, realisasi tersebut sangat baik karena lebih rendah dari target nilai minimal yang ditetapkan Tahun 2018 sebanyak 1 temuan (jumlah).

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

Realisasi jumlah temuan BPK yang berulang atas pengelolaan keuangan di BKP Kelas II tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 lingkup Kementerian Pertanian secara menyeluruh yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja Tahun 2018-2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2018 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 0% telah memenuhi target minimal untuk jangka menengah sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0%

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 0% atau tidak ditemukan temuan berulang, BPK sudah melakukan audit pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019. Capaian ini di bawah standar nasional Barantan Kementerian Pertanian. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

Tabel 29

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- 2) Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan :

- 1) Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan.
- 2) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK ataupun Itjen
- 3) Tersedianya SDM yang memadai
- 4) Menyelesaikan perencanaan secara tepat waktu
- 5) Meningkatkan SOP Penatausahaan PNPB terutama terkait jangka waktu penyerahan bukti pembayaran kepada Bendahara penerimaan dan penyusunan backup data;
- 6) Fasilitas mesin EDC diruang pelayanan dan tempat pemeriksaan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK-8 menunjukkan efisiensi sebesar 1,01% dengan nilai efisiensi 52,25% sebagaimana perhitungan pada Tabel 29 dibawah ini.

Tabel 29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK. 8

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas I yang terjadi berulang	Layanan Perkantoran	7.677.284.562	7.677.284.562	1,02 %	50,75%
	Layanan Internal overhead	853.405.800	853.405.800		

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

- g.** Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- 1) Pengembangan sistem pembayaran yang lebih cepat dan transparan berbasis data elektronik (simponi billing) barantan.
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM Bidang keuangan melalui pelatihan dan sosialisasi peraturan PMK yang terbaru
 - 3) Meningkatkan sarana sistem jaringan sehingga tidak terjadi temuan yang mengakibatkan tidak dapat ditelusuri data PNBP

329. IKSK 9. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018 ini, BKP Kelas II Tanjungpinang terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Telah dilakukan berbagai agenda akuntabilitas kinerja di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), meliputi aspek : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, sehingga

memperkecil temuan itjen terhadap implementasi SAKIP dan
Tabel 29
Pengelolaan Keuangan.

Tabel 30
Perkembangan Capaian IKSK 9

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019	% realisasi thd target th 2018	% realisasi th 2018 thd 2017	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK 9	-	-	-	1	1		-	
Realisasi	-	-	-	0		0%	-	0%

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2018

Realisasi temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang sebesar 0 (0%), jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sebanyak 1 realisasi ini mencerminkan bahwa pimpinan dan seluruh pegawai lingkup BKP I Tanjungpinang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan cukup baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

Realisasi jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang di BKP Kelas II Tanjungpinang tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sehubungan dengan Revisi Renstra 2015-2019 Badan Karantina Pertanian.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2018 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2018 senilai 0% telah memenuhi target minimal untuk jangka menengah sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0%

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang dengan Badan Karantina Pertanian

Realisasi capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 0% atau tidak ditemukan temuan yang berulang dalam pengelolaan keuangan,

Tabel 30
capaian ini masih di bawah standar nasional Barantan. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan :

- 1) Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- 2) Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan :

- 1) Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan.
- 2) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK ataupun Irjen
- 3) Tersedianya SDM yang memadai
- 4) Menyelesaikan perencanaan secara tepat waktu.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSK-9 menunjukkan efisiensi sebesar 1,01% dengan nilai efisiensi 52,52% sebagaimana perhitungan pada Tabel 31.

Tabel 31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap IKSK.9

IKSK	Nama Output	(PAKixCAKi)	(PAKixCAKi) – RAKi	Efisiensi	Nilai Efisiensi
jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	Layanan Perkantoran	5.919.791.000	59.562.529	1,01 %	52,52%

*) Perhitungan mengikuti formula

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{PAKixCKi} - \text{RAKi}}{\text{PAKixCKi}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50)$$

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- 1) Melakukan koordinasi dengan tim pusat dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM Bidang keuangan melalui pelatihan dan sosialisasi peraturan PMK yang terbaru;

IV. 3.6. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati tahun 2018, BKP Kelas II Tanjungpinang memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp. **9.234.386.000** yang dipergunakan untuk membiayai program kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi serapan anggaran mencapai Rp. **9.138.572.171** atau **98,96%**

Tabel 32
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.106.648.000	4.098.973.336	99,67
2	Belanja Barang	4.775.679.000	4.756.872.740	99,61
3	Belanja Modal	853.750.000	853.405.800	99,96
Jumlah		9.736.077.000	9.709.251.800	99,66

Tabel 33

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2017	%
1	Belanja Pegawai	4.098.973.336	4.327.673.461	94,71
2	Belanja Barang	4.756.872.740	5.153.723.596	92,29
3	Belanja Modal	853.405.800	3.308.864.102	25,79
	Total Belanja	9.138.572.171	12.790.261.159	71,44

Tabel 34
Realisasi Program Perkegiatan Utama

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisan Dana	Persentase
51 Belanja Pegawai	4.106.648.000	4.092.973.336	13.674.664	99.67 %
52 Belanja Barang	4.775.679.000	4.756.872.740	18.806.260	99.61 %
53 Belanja Modal	853.750.000	853.405.800	344.200	99.96 %

Pagu anggaran DIPA BKP Kelas II Tanjungpinang mengalami fluktuatif peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran. Namun demikian pada TA 2018 untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perkarantinaan.

Akuntabilitas keuangan BKP Kelas II Tanjungpinang dinilai berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang ditunjukkan dengan realisasi keuangan yang baik.

Sedangkan capaian realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 2.267.518.164 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1.700.000.000, yang berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 133,38%. Realisasi capaian PNBP di BKP Kelas

II Tanjungpinang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 35. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran serta Target dan Realisasi PNBK BKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran			PNBK		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2016	10.166.842.000	9.976.755.039	98,41	1.500.000.000	1.735.516.593	115,70
2017	13.320.194.000	12.790.261.159	95,55	1.600.000.000	2.156.964.336	134,81
2018	9.736.077.000	9.703.251.876	99,66	1.700.000.000	2.267.518.164	133,38

34 . HAMBATAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 masih ditemukan beberapa hambatan/kendala baik hambatan internal maupun eksternal antara lain :

- 1) Masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai karantina dan prosedurnya, terutama masyarakat yang membawa media pembawa tentengan (sedikit), sehingga banyak barang yang terpaksa dilakukan penahanan dan pemusnahan.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana, alat dan bahan laboratorium, serta kompetensi SDM sehingga beberapa pengujian sampel masih harus dilakukan di tempat lain (Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian), terutama di wilayah-wilayah kerja.
- 3) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik antara lain ruang pelayanan kurang memadai.
- 4) Masih belum memiliki instalasi karantina tumbuhan (IKT/*screen house*).
- 5) Belum memiliki *incenerator* untuk melaksanakan pemusnahan komoditas hewan/tumbuhan.
- 6) Keterbatasan jumlah SDM (POPT terampil), kualitas, kompetensi dan jumlah SDM di BKP Kelas II Tanjungpinang masih memerlukan peningkatan keterampilan teknis operasional.

-
- 7) Belum lancarnya arus pelaporan/pengumpulan data dari masing-masing bagian sehingga pelaporan kegiatan tidak tepat waktu.

35. UPAYA DAN TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah dalam mencapai tujuan peningkatan BKP Kelas II Tanjungpinang, strategi yang akan ditempuh yaitu :

- 1) Menambah alokasi anggaran untuk alat dan bahan laboratorium, baik yang berada di kantor pusat maupun pada wilayah kerja, pengadaan *incenerator* dan instalasi karantina tumbuhan (IKT/*screen house*).
- 2) Menambah alokasi SDM POPT Terampil serta memperbanyak kegiatan yang seperti *inhouse training*, magang dan pelatihan-pelatihan baik teknis maupun administrasi untuk meningkatkan kemampuan SDM/pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BKP I Tanjungpinang.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lebih memperkenalkan tentang karantina terhadap masyarakat.
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran serta untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga proses kegiatan dari mulai perencanaan, proses maupun pelaporan dapat terlaksana dengan baik.

II. P E N U T U P

Laporan Kinerja BKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2018 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja bidang perkarantina dan pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas BKP Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka meningkatkan pembangunan Pertanian dengan melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja TA. 2018 BKP Kelas II Tanjungpinang.

- Capaian Akuntabilitas keuangan BKP Kelas II Tanjungpinang dinilai berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 99,66%.
- Berbagai hambatan/kendala ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 baik hambatan internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana alat dan bahan laboratorium terutama di wilayah-wilayah kerja, sarana dan prasarana pelayanan publik, *incenerator* untuk pemusnahan, instalasi karantina tumbuhan (IKT/*screen house*), jumlah dan kualitas SDM (POPT Terampil), belum lancarnya arus pelaporan/pengumpulan data dari masing-masing bagian sehingga pelaporan kegiatan tidak tepat waktu. Sedangkan hambatan/kendala dari eksternal seperti masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai karantina dan prosedurnya, terutama masyarakat yang membawa media pembawa tentengan (sedikit), sehingga banyak barang yang terpaksa dilakukan penahanan.
- Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dilakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja BKP Kelas II Tanjungpinang antara lain: menambah alokasi anggaran untuk alat dan bahan laboratorium, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM seperti inhouse training, magang dan pelatihan-pelatihan baik teknis maupun administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lebih

memperkenalkan tentang karantina terhadap masyarakat, dan mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI).

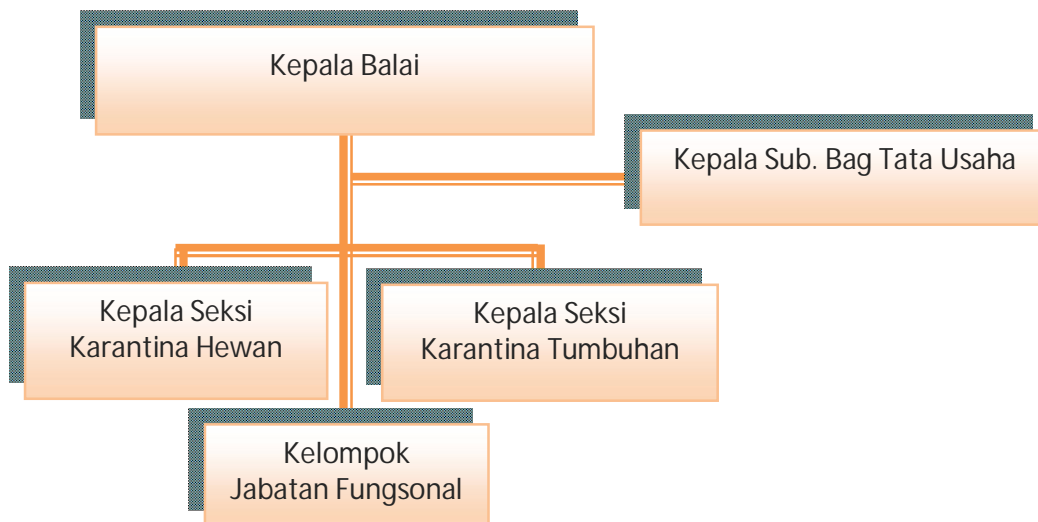
Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun 2018.

BKP Kelas II Tanjungpinang akan senantiasa melakukan berbagai langkah perbaikan dan penyempurnaan laporan ini, sehingga dapat mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

V. Struktur Organisasi BKP Kelas II Tanjungpinang



Lampiran 2.

**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
di BKP Kelas II Tanjungpinang TA.2018**

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.106.648.000	4.098.973.336	99,67
2	Belanja Barang	4.775.679.000	4.756.872.740	99,61
3	Belanja Modal	853.750.000	853.405.800	99,96
Jumlah		9.736.077.000	9.709.251.800	99,66

Lampiran 3.

**Capaian Indikator Kinerja BKP
Kelas II Tanjungpinang Tahun
2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan Publik Badan Karantina Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BKP Kelas II	3.38 Skala Likert (1-4)	3,497	Berhasil (103,46%)
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon III Terhadap Layanan Internal	3.63 Skala Likert (1-4)	3,43	Berhasil (94,49%)
	Jumlah Kasus Komoditas Pertanian di Lingkup BKP Kelas II yang di selesaikan	1,00	0	Tidak Berhasil (-100%)
	Jumlah Komoditas Ekspor Pertanian di Lingkup BKP Kelas II yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan`	0,00	0	Berhasil (100%)
	Jumlah komoditas import pertanian di lingkup BKP Kelas II yang memenuhi persyaratan Impor Indonesia	2,00	546	Sangat Berhasil (273%)
	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas II	1,00	0	Berhasil (100%)
	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas II	2,00	0	Sangat Berhasil (100%)
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas II yang terjadi berulang	0,00	0	Berhasil (100%)
	Jumlah temuan ITJEN atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	0,00	0	Berhasil (100%)

Lampiran 4.

Temuan OPTK di BKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2018

No	Temuan OPTK	Gol	Frek
1	NIHIL		

Temuan HPHK di BKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2018

No	Temuan HPHK	Gol	Frek
1	NIHIL	-	-
	Jumlah		-

